BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Harapan (*Expectancy Theory*)

Teori harapan atau *Expectancy Theory of Motivation* yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom pada tahun 1964 memiliki tiga asumsi yaitu :

a. Harapan hasil (*outcome expectancy*)

Harapan hasil memiliki artian bahwa hasil akan dapat dicapai dengan adanya perlakuan tertentu dari seseorang yang mengharapkan hasil tersebut.

b. Valensi (*valence*)

Valensi memiliki artian bahwa terdapat nilai yang akan orang berikan kepada hasil yang diharapkan karena setiap hasil atau capaian itu memiliki nilai bagi individu.

c. Harapan usaha (*effort expectancy*)

Harapan usaha memiliki artian bahwa terdapat usaha dari seseorang dalam pencapaian suatu hasil tertentu, karena setiap capaian itu berkaitan dengan seberapa sulit mencapainya.

Vroom dalam Hubeis (2013) menyatakan bahwa individu termotivasi untuk melakukan hal tertentu guna pencapaian tujuan apabila meyakini bahwa tindakan tersebut akan mencapai tujuan tersebut.

Teori harapan didasarkan pada :

- Harapan (*Expectancy*) merupakan kesempatan yang ada akan kejadian karena suatu tindakan atau penilaian bahwa upaya yang dilakukan akan berdampak pada kinerja yang diharapkan.
- Nilai (*Valence*) adalah dampak yang ditimbulkan dari perilaku itu memiliki nilai tertentu bagi individu yang bersangkutan, atau dapat dikatakan bahwa nilai adalah hasil dari keinginan seseorang yang dikaitkan dengan individu dengan hasil yang diharapkan.
- Pertautan (*Instrumentality*) merupakan persepsi yang timbul dari individu mengenai hasil pada tingkat pertama ekspektansi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu karena adanya keinginan untuk pencapaianya yang akan berdampak pada penghargaan.

2. Teori Partisipasi

Menurut Oakley (1991) dalam Ariesta dan Wijaya (2014) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan, sumbangan sukarela, dan keikutsertaan masyarakat dalam program kegiatan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang mengetahui kebutuhan, masalah, dan cara mengatasi kendala atau permasalahan tentang pembangunan yang ada di masyarakat.

Tiga konsep partisipasi yang dikaitkan dengan pembangunan masyarakat menurut Slamet (2003) adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki artian bahwa partisipasi itu lebih kepada menempatkan wakil rakyat dan menjadikan wakil rakyat sebagai pengaruh untuk lembaga pemerintah daripada keikutsertaan secara aktif dalam proses yang ada di pemerintahan tersebut.

b. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang dijadikan sebagai pihak eksternal dalam sebuah proses pembangunan, yang bertugas untuk pengambilan keputusan semua tahapan pembangunan. Partisipasi sosial juga bertugas dalam evaluasi, penilaian, pemantauan, dan implementasi dari pembangunan yang dilakukan. Tujuan utama dari partisipasi sosial adalah tempat pembelajaran bagi komunitas yang terlibat di dalamnya.

c. Partisipasi Warga

Partisipasi warga adalah partisipasi yang menekankan pada keikutsertaan aktif dari masyarakat dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Masyarakat dijadikan sebagai subyek pembangunan yang memiliki peran secara aktif dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Terlebih pada pembangunan yang berkonsep pembangunan lokal, masyarakat lokal sangat memberikan peran penting dalam keberhasilan pembangunan tersebut. Hal itu disebabkan karena masyarakat lokal yang mengetahui masalah,

kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga suara dari masyarakat sangat diperlukan untuk proses pembangunan agar terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Teori Motivasi

Motivasi merupakan elemen penting dalam memperbaiki produktivitas kerja, pelaku kerja memiliki anggapan mengenai motivasi berkaitan dengan kepuasan dan sistem penghargaan. Keadaan organisasi yang telah menyita banyak waktu, tenaga, dan upaya dari para pelaku kerja untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerja. Kepuasan kerja dan motivasi kerja mampu dijadikan kunci dasar untuk perbaikan produktivitas kerja (Andjarwati, 2015).

Menurut Abraham Harold Maslow (1954) dalam teorinya yaitu '*Hierarchy of Needs Theory*', setiap manusia memiliki kebutuhan yang memunculkan semangat berdasarkan dari kepentingan individu tersebut. Individu merupakan karyawan yang tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan. Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki dorongan yang tumbuh secara terus menerus dan memiliki potensi besar.

Tingkatan kebutuhan menurut Abraham Harold Maslow adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan Fisiologis (*The Physiological Needs*)

Kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan oleh manusia adalah berupa hal-hal yang sangat erat berhubungan dengan fisik maupun non-fisik

manusia. Kebutuhan tersebut seperti halnya adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dll.

b. Kebutuhan Rasa Aman (*The Safety Needs*)

Manusia memiliki kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan rasa aman. Manusia hidup di dunia ini membutuhkan rasa aman dan terbebas dari segala gangguan yang menimpa fisik maupun batinnya.

c. Kebutuhan Kasih Sayang (*The Belongingness and Love Needs*)

Seorang individu memerlukan pemberian dan penerimaan rasa cinta, kasih, sayang dan membutuhkan teman untuk kehidupannya. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya teman ataupun rasa kasih sayang di sekelilingnya.

d. Kebutuhan Menghargai (*The Esteem Needs*)

Individu membutuhkan kecukupan, kebebasan, kekuasaan, dan prestasi untuk kemandirian. Sedangkan untuk kebutuhan harga diri, manusia memerlukan kebutuhan status, penghargaan, dan martabat.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*The Need for Self-Actualization*)

Manusia membutuhkan pengakuan mengenai kemampuannya dari seseorang lain (individu lain) untuk pengembangan diri dan rasa ingin menjadi lebih baik menjadikan dirinya sebagai “orang”.

4. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan secara mental dan emosi serta ikut mempertanggungjawabkan keputusan yang menjadi keputusan bersama. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk mencapai pemberdayaan demokratis warga negara (Zandbergen & Leiden, 2014). Partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam suatu kelompok untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati (Bhuiyan, 2010). Partisipasi yang muncul secara individu dapat dikatakan lebih memberikan efek besar karena, tidak ada paksaan dalam melakukannya (Jin, 2017). Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus bersifat sukarela (Keller, *et.al*, 2015).

Menurut penelitian Bhatti (2007), Yip (2012), dan Doucouliagos dalam Lau (2014) menyebutkan bahwa partisipasi karyawan meningkatkan produktivitas yang lebih besar untuk perusahaan. Partisipasi populasi yang berpendidikan dirasa lebih efektif untuk melakukan interaksi dengan pemerintah, perusahaan, dan satu sama lain (Marginson, 2016). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas saat penyusunan kebijakan (Coryanata, 2012). Dapat disimpulkan jika tingkat partisipasi karyawan tinggi maka produktivitas di perusahaan akan tinggi pula dan akhirnya usaha yang dijalankan akan semakin berkembang, hal ini akan sejalan jika diterapkan pada desa. Apabila partisipasi masyarakat tinggi maka akan memengaruhi keberhasilan unit-unit usaha desa dan

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

5. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab V yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

i. Perencanaan

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibuat oleh Sekretaris Desa yang kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah dilakukan pembahasan dan terjadi kesepakatan bersama, kemudian Rancangan Peraturan Desa diberikan kepada Bupati melalui Camat. Apabila Bupati tidak mengembalikan paling lambat 20 hari sejak diterima, maka rancangan

tersebut berlaku secara otomatis. Sebaliknya, apabila rancangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, maka Kepala Desa harus melakukan perbaikan.

ii. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan keuangan desa, desa harus memiliki rekening kas desa untuk penerimaan dan pengeluaran kas desa. Semua transaksi tersebut harus memiliki bukti sah dan lengkap. Selain disimpan dalam rekening kas desa, bendahara juga diperbolehkan menyimpan uang pada kas desa dengan jumlah yang sudah ditetapkan untuk kegiatan operasional. Pengeluaran yang dilakukan oleh desa harus sesuai dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

iii. Penatausahaan

Penatausahaan wajib dilakukan oleh bendahara desa. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Kepala Desa. Terdapat tiga dokumen yang terkait dengan penatausahaan ini, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

iv. Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang

diberikan kepada Bupati terdiri dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

v. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahunnya. Laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

6. Pengertian Kemandirian Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan dapat dilakukan dengan melihat keadaan desa tersebut, kearifan desa, serta kemampuan yang bisa dihasilkan oleh desa untuk dijadikan sebagai peningkatan pendapatan desa. Pendapatan desa ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk menjadikan desa mandiri. Kemandirian desa diwujudkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa mandiri adalah desa maju yang

memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa maju itu sendiri adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Indeks desa membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun dimensi dan indikator dari indeks desa membangun, sebagai berikut rinciannya :

Tabel 2.1
Indeks Desa Membangun

No	Indeks	Dimensi	Indikator
1.	Ketahanan sosial	a. Modal sosial	• Memiliki solidaritas sosial. • Memiliki toleransi. • Rasa aman penduduk. • Kesejahteraan sosial.
		b. Kesehatan	• Pelayanan kesehatan. • Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. • Jaminan kesehatan.
		c. Pendidikan	• Akses ke pendidikan dasar dan menengah.

No	Indeks	Dimensi	Indikator
			• Akses ke pendidikan non formal. • Akses ke pengetahuan.
		d. Permukiman	• Akses ke air bersih dan air minum layak. • Akses ke sanitasi. • Akses ke listrik. • Akses ke informasi dan komunikasi.
2.	Ketahanan Ekonomi	Ekonomi	• Keragaman produksi masyarakat desa. • Tersedia pusat pelayanan perdagangan. • Akses distribusi atau logistik. • Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. • Lembaga ekonomi. • Keterbukaan wilayah.
3.	Ketahanan Ekologi	Ekologi	• Kualitas lingkungan. • Potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

Untuk mengetahui keberadaan desa atau status desa maka terdapat rumus dalam perhitungannya berdasarkan item-item indikator yang ada. Rumus pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

Keterangan :

IDM : Indeks Desa Membangun
IKS : Indeks Ketahanan Sosial
IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan atau Ekologi

Setelah diketahui hasil dari perhitungan menggunakan rumus Indeks Desa Membangun di atas, maka status desa dapat disimpulkan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Desa mandiri adalah desa dengan Indeks Desa Membangun > 0,8155.
b. Desa maju adalah desa dengan Indeks Desa Membangun yaitu 0,7072 < IDM ≤ 0,8155.
c. Desa berkembang adalah desa dengan Indeks Desa Membangun yaitu 0,5989 < IDM ≤ 0,7072.
d. Desa tertinggal adalah desa dengan Indeks Desa Membangun yaitu 0,4907 < IDM ≤ 0,5989.
e. Desa sangat tertinggal adalah desa dengan Indeks Desa Membangun ≤ 0,4907.

7. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan ciri seorang individu yang mampu dilihat dari pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki dan digunakan untuk menyelesaikan amanah atau tugas yang dibebankan kepada individu

tersebut (Hevesi, 2005). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki individu suatu kelembagaan dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya untuk pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Kapasitas individu harus dilihat sebagai kemampuan dalam pencapaian tujuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seorang individu untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepada dirinya dengan modal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Sumber daya manusia menjadi penopang dan penggerak roda sebuah organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang merupakan penopang dan penggerak suatu organisasi harus dikelola dengan baik supaya menghasilkan kontribusi bagi organisasi dan terwujudnya tujuan organisasi. Sama halnya dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah juga harus memiliki kualitas yang baik untuk mengelola keuangan pemerintah daerah atau desa dengan bermodal pendidikan akuntansi, seringnya mengikuti pelatihan, dan memiliki banyak pengalaman. Sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang nyata kepada pemerintah daerah atau desa (Yosefrinaldi, 2013).

Kompetensi juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ada di suatu organisasi untuk memimpin organisasi menjadi lebih baik. Gaya

kepemimpinan dalam suatu organisasi memengaruhi kinerja dan output organisasi. Organisasi akan berfungsi secara efektif ketika manajemen menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat (Ukaidi, 2016). Peningkatan kualitas kinerja pemimpin dapat dilakukan dengan program pelatihan untuk menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, atau bisa dengan pembelajaran pengalaman (Kraus & Wilson, 2014).

Menurut Hutapea dan Thoha dalam Drina, dkk (2014) terdapat komponen utama yang menjadi pembentuk kompetensi, yaitu :

i. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi dan wawasan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar dalam melakukan dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya sesuai dengan bidangnya. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu mampu digunakan untuk mengetahui tujuan pokok dan fungsi organisasi, serta mengetahui cara penggunaan informasi, peralatan, dan teknik yang didapatkan dengan benar.

ii. Keterampilan

Keterampilan adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh individu selain pengetahuan yang didapatkan melalui jalur pendidikan formal ataupun kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang dimiliki oleh individu ini seperti halnya perilaku dalam pemilihan metode kerja yang akan digunakan yang dianggap efektif dan efisien. Keterampilan individu ini meliputi beberapa hal yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan

tanggung jawab dengan baik, kemampuan mengatasi permasalahan yang ada, kemampuan dalam penentuan prioritas, dan kemampuan dalam pemberian informasi layanan.

iii. Sikap Kerja

Sikap kerja adalah tingkah laku dan perasaan senang atau tidak yang menjadi reaksi dari keadaan luar lingkungan suatu organisasi. Sikap kerja yang dimiliki individu meliputi beberapa hal, yaitu kreativitas yang dimiliki individu dalam melakukan pekerjaan, semangat tinggi dalam bekerja, dan mempunyai kemampuan perencanaan dan pengorganisasian yang baik.

B. Hipotesis

1. Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Oakley (1991) dalam Ariesta, dkk (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu dengan keikutsertaan seorang individu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut didorong oleh harapan yang dimiliki seorang individu untuk mencapai suatu tujuan seperti yang dikemukakan oleh Vroom dalam teorinya yaitu Teori Harapan pada tahun 1964.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa akan memberikan dampak baik bagi desa karena aspirasi

masyarakat tertuang ke dalam kegiatan desa dan kebutuhan masyarakat tercermin di dalam aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berdampak kepada pengelolaan dana desa yang baik. Penelitian terdahulu dari Mada, dkk (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian dari Kartika (2012) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dan penggerak terciptanya pembangunan masyarakat desa.

Penelitian dari Saputra (2016) menyatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa akan berdampak pada realisasi yang tidak maksimal. Penelitian dari Helmayani, dkk (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap implementasi *good village governance*. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis pertama yang diajukan adalah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

H_1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Slamet (2003) yang menyatakan bahwa perlu adanya partisipasi nyata dan aktif dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Adanya partisipasi nyata

tersebut juga sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Vroom (1964) yang menyatakan bahwa dalam suatu hasil itu terdapat nilai yang akan diberikan oleh seorang individu, sehingga dengan adanya peran aktif dari seorang individu dan mengerahkan semua pengetahuan serta keahliannya untuk menghasilkan sesuatu maka akan berdampak pada pemberian nilai dari orang lain terhadapnya. Pada hal ini, peran aktif masyarakat ditujukan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi untuk menggunakan semua pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.

Proses pengelolaan dana desa meliputi beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses tersebut dibutuhkan pihak yang mengetahui mengenai keuangan dan akuntansi dari proses pelatihan, akademis, ataupun pengalaman yang dimiliki. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu baik, maka akan berdampak pada pengelolaan keuangan dana desa yang baik pula.

Penelitian dari Mada, dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dari Astini, dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Wardani (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan

pemerintahan desa. Penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kedua yang diajukan adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

H_2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

3. Peran partisipasi masyarakat terhadap kemandirian desa.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses mewujudkan kemandirian desa. Menurut Slamet (2003) salah satu dari konsep partisipasi adalah partisipasi warga yang memiliki artian bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi untuk mewujudkan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Sejalan dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom (1964) yang menyatakan bahwa seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu karena individu yakin terdapat kaitan antara seberapa besar usaha yang dilakukan dengan hasil yang akan didapatkan nantinya.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan desa seperti halnya pembangunan desa, ataupun ikut mendukung dalam proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan proses kegiatan lainnya menuju kepada kemandirian desa. Partisipasi masyarakat yang baik akan berpengaruh pada

terwujudnya kemandirian desa. Penelitian dari Kusrini, dkk (2017) dan Laksana (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai desa mandiri sangat berpengaruh dengan adanya pelatihan, pendampingan, forum desa, dan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan wawasan dan keterampilan masyarakat.

Penelitian dari Listya, dkk (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek PNPM Mandiri Pedesaan 2009. Penelitian dari Kagoya, dkk (2015) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ketiga yang diajukan adalah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

H_3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kemandirian desa.

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Oakley (1991) dalam Ariesta, dkk (2014), partisipasi adalah keikutsertaan dan sumbangan sukarela masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga didasarkan pada konsep partisipasi menurut Slamet (2003) menyatakan bahwa dalam pemerintahan terdapat

wakil rakyat untuk memberikan pengaruh dan adanya peran aktif masyarakat dengan segala aspirasinya untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow (1954) juga mendasari penurunan hipotesis dalam penelitian ini dengan pernyataan bahwa dalam diri manusia itu muncul motivasi karena adanya kebutuhan terjaminnya kehidupan di dunia dengan adanya kecukupan, kebebasan, adanya rasa aman, rasa kasih sayang sesama manusia, atau kehidupan sosial yang baik.

Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sangat diperlukan dalam proses kemajuan dari desa yang bersangkutan. Sumber daya manusia seperti halnya aparatur desa khususnya kepala desa sangat dituntut untuk memiliki kompetensi dalam berbagai hal. Kompetensi dalam hal pengelolaan keuangan desa, komunikasi dengan masyarakat desa, ide kreatif yang dimiliki untuk mewujudkan kemandirian desa sangat dibutuhkan oleh suatu desa.

Penelitian Arumsari, dkk (2017) menyatakan bahwa kepala desa yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dengan baik sesuai dengan budaya masyarakat akan berpengaruh secara langsung dengan inovasi pembangunan di desa. Penelitian dari Kristianto (2013) menyatakan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam kegiatan pembangunan. Penelitian dari Ardiyanti dan Supriadi (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi *Good Governance*. Berdasarkan penjelasan di

atas, hipotesis keempat yang diajukan adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

H_4 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

5. Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kemandirian desa.

Pengelolaan dana desa yang baik akan berdampak pada terwujudnya kemandirian desa. Pembangunan yang dilakukan oleh desa dengan menggunakan dana desa akan menciptakan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Didasarkan pada teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow (1954) yang menyatakan bahwa seorang individu tersebut memiliki kebutuhan rasa aman atau jaminan kehidupannya yang mana hal tersebut memunculkan motivasi untuk mewujudkan kesejahteraan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Pengelolaan dana desa dengan baik juga akan memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat yang baik pula untuk mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian dari Puspayanthi, dkk (2017) menyatakan bahwa penguatan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian desa. Penelitian dari Sofiyanto, dkk (2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian dari Fahri (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dana berpengaruh positif dan

signifikan terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan efektivitas program pembanguna desa. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kelima yang diajukan adalah pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

H_5 : Pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian desa.

6. Peran partisipasi masyarakat terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan salah satu konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Slamet (2003) yaitu partisipasi warga. Partisipasi warga memiliki artian masyarakat memiliki partisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan karena pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain didasarkan pada teori partisipasi, hipotesis yang diturunkan dalam penelitian ini juga didasarkan pada teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom (1964). Menurut Vroom, individu akan terdorong untuk melakukan hal tertentu guna mencapai tujuan apabila meyakini bahwa tindakan tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa diharapkan mampu memberikan dampak bagi terwujudnya kemandirian desa. Partisipasi masyarakat yang baik akan memberikan dampak baik pula dalam proses pengelolaan keuangan dana desa karena

dana desa dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu dengan ikut andilnya masyarakat di dalam pengelolaan. Melalui pengelolaan dana desa ini diharapkan kemandirian desa mampu terwujud. Keuangan desa khususnya dana desa dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kemandirian bagi desa. Dengan adanya unit-unit usaha yang dimiliki desa akan menghasilkan pendapatan bagi desa sebagai wujud kemandirian desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Puspayanthi, dkk (2017), dan Kusrini, dkk (2017), maka hipotesis keenam yang diajukan adalah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

H_6 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

7. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

Dilihat dari teori partisipasi yang dikemukakan oleh Oakley (1991) dalam Ariesta, dkk (2014) dan konsep partisipasi dari Slamet (2003), perlunya partisipasi masyarakat secara aktif untuk mewujudkan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Selain perlunya masyarakat yang andil aktif, juga diperlukan wakil rakyat yang bisa memberikan pengaruh terhadap pemerintahan untuk pembangunan yang akan dilakukan dengan segala

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu juga sesuai dengan teori motivasi dari Maslow (1954) yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan kecukupan, kebebasan, terjaminnya rasa aman, hidup sosial baik, yang melatar belakangi munculnya motivasi melakukan sesuatu.

Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur desa secara khusus, sangat berpengaruh terhadap kemandirian desa. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu baik, maka akan berdampak pada pengelolaan dana desa yang baik dan akan mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa yang akan dicapai tidak akan lepas dari pengelolaan keuangan yang baik dalam suatu desa. Berdasarkan dengan penelitian Mada, dkk (2017), Arumsari, dkk (2017), dan Puspayanthi, dkk (2017), maka hipotesis ketujuh yang diajukan adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

H_7 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

C. Model Penelitian

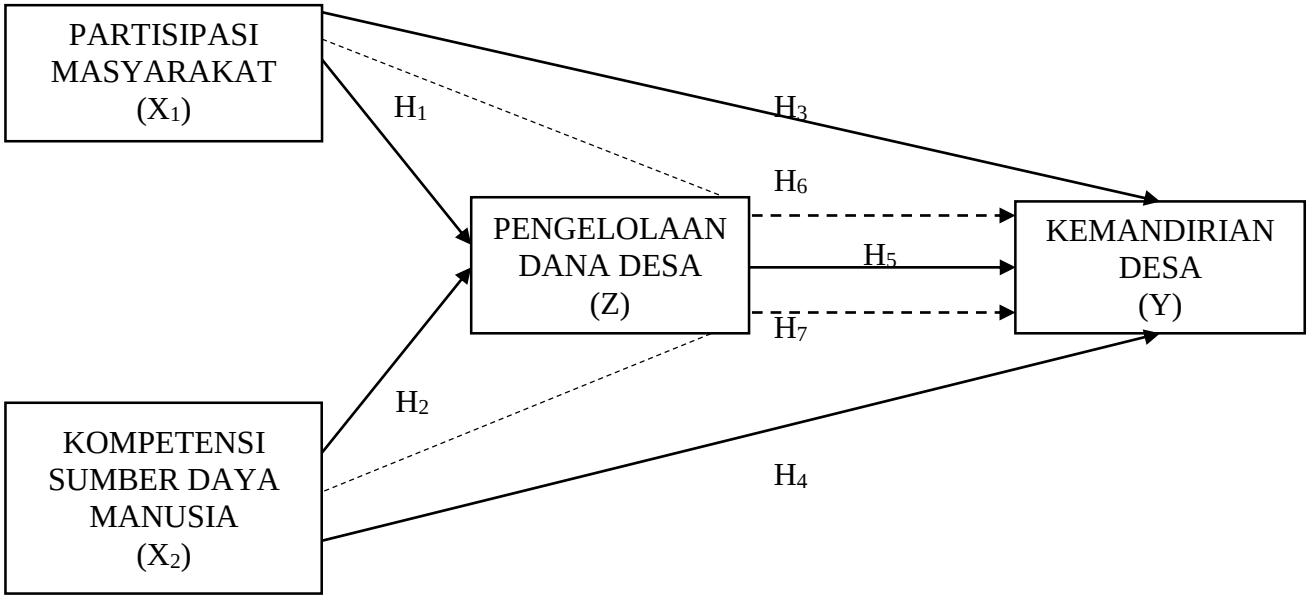

Gambar 2.1
Model Penelitian